

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara wawancara dan dokumentasi, maka penulis mendapatkan data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dari Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru. Berikut identitas informan.

Nama : Diah Ekawati Suprihati, SE
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin 16 September 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian (Penata TK.I/IIIId)
Riwayat Pendidikan : SDN Landasan Ulin Timur 1
SMPN Landasan Ulin
SMAN Gambut
S 1 (Fakultas Ekonomi UVAYA Banjarbaru) Jurusan Studi Pembangunan

Nama : Anharuddin Arief, SE
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin 5 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan (Penata TK.I/III C)
Riwayat Pendidikan : SDN Pasar Lama 2 Banjarmasin
SMPN 24 Banjarmasin
SMAN 2 Banjarmasin
S 1 (Fakultas Ekonomi UNLAM) Jurusan Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bendahara keuangan dan Kasubag Umpeg Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru maka diperoleh data-data sebagai berikut.

1. Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru

Pada tahun 2016 Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan akuntansi pemerintahan pada sistem pelaporan keuangannya.¹ Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan PP 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru hal tersebut dibuktikan dengan penyajian laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yang mencakup informasi mengenai Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

¹ Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tahun 2017 hlm.1

a. Data tentang akuntansi berdasarkan PP No.71 Tahun 2010

Dalam PP No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdiri dari pengakuan, pengukuran dan penyajian. Pengakuan terdiri dari pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan pendapatan, pengakuan beban dan belanja. Pengukuran terdiri dari pengukuran aset dan kewajiban dan terakhir penyajian yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan dan kejadian kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat di estimasi dengan andal.² Pengakuan terdiri dari pengakuan aset, pengakuan

² Lihat PP No. 71 Tahun 2010, paragraf 84, hlm.36

kewajiban, pengakuan pendapatan, pengakuan beban dan belanja yang terdiri sebagai berikut

a. Pengakuan Aset

Aset yang dimiliki Dinas Perdagangan tersebut telah diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru “*Aset itu kami bagi dua menjadi aset lancar dan aset tetap adapun aset lancar terdiri dari piutang, persediaan, kas dll aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dll*”³

Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.⁴ Aset tetap dalam entitas pemerintah daerah umumnya digolongkan menjadi tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, mebel dan perlengkapan semua itu diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah ke pemerintah daerah.⁵

Adapun Klasifikasi aset lancar dan aset tetap yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 4.1 tentang aset lancar dan tabel 4.2 tentang aset tetap sebagai berikut.

³ Ankhardin, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019.

⁴ Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm.129

⁵ *Ibid.*, hlm.132

Tabel 4.1 Aset Lancar

No	Uraian	Realisasi TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	-	-
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
4	Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional	-	-
5	Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional	-	-
6	Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah	-	-
7	Kas Lain-lain	-	-
8	Investasi Jangka Pendek	-	-
9	Piutang Pajak	-	-
10	Penyisihan Piutang Pajak	-	-
11	Piutang Retribusi	5.023.939.600,00	4.582.071.875,00
12	Penyisihan Piutang Retribusi	(4.085.965.593,00)	(3.511.330.657,50)
13	Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya	449.350.481,00	449.350.481,00
14	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Sah	(449.350.481,00)	(449.350.481,00)
15	Piutang Bagi Hasil Propinsi	-	-
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
17	Belanja Dibayar Dimuka	-	-
18	Persediaan	4.428.950,00	2.358.650,00
19	Investasi Jangka Panjang	-	-
20	Investasi Non Permanen	-	-
21	Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)	-	-
TOTAL		942.402.957,00	1.073.099.867,50

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tahun 2019

Tabel 4.2 Aset Tetap

Komponen Aset Tetap	Tahun 2017	Tahun 2016
Tanah	24.495.814.600,00	21.502.814.600,00
Peralatan dan Mesin	4.044.664.839,76	2.516.251.358,18
Gedung dan Bangunan	37.721.776.247,04	29.159.605.579,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.283.892.685,00	2.076.567.685,00
Aset Tetap Lainnya	821.330.000,00	702.045.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(11.330.130.672,75)	(8.623.484.266,74)
Aset Tetap	58.037.347.699,05	47.333.799.955,44

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tahun 2019

b. Pengakuan Kewajiban

Utang/kewajiban atau *liabilities* timbul ketika aktiva telah diserahkan atau pemerintahan pusat/daerah telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aktiva.⁶

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah jumlah pokok pinjaman yang harus diangsur pembayarannya setiap bulan dan dalam periode waktu yang lama. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus dibayar dalam waktu sebulan atau dua bulan dan tidak lebih dari satu tahun.⁷

Kewajiban Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Adapun kewajiban jangka pendek terdiri dari akun utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang

⁶ Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm.141

⁷ Carol Costa dan C.Wesley Addison, *Alpha Teach Yourself Accounting dalam 24 jam* (Jakarta: Prenada, 2007), hlm. 9

jangka pendek lainnya dan kewajiban untuk dikonsolidasikan. Kewajiban di akui oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru pada saat kewajiban itu timbul.

*“Kalau untuk kewajiban itu mba ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang kan jangka pendek itu terdiri dari pendapatan diterima dimuka, utang belanja atau beban semua itu ya diakui pada saat dana pinjaman atau utang telah diterima oleh disdag dan diakui sebanyak yang masuk”*⁸

Adapun Klasifikasi kewajiban yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 4.3 tentang kewajiban jangka pendek berikut.

Tabel 4.3 kewajiban jangka pendek

No	Uraian	31-Des-17	31-Des-16
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
2	Utang Bunga	-	-
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka	78.458.806,45	72.778.838,71,71
5	Utang Beban	9.252.492,00	4.486.551,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
7	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	6.520.855.753,00	5.205.209.990,00
	Jumlah	6.608.567.051,45	5.282.475.379,71

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tahun 2019

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan di akui ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi.

Pengakuan pendapatan diakui segera setelah dukungan administrasi diketahui.⁹

⁸ Ankharudin, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019.

⁹ Indra Bastian, *op.cit.*, hlm.147

Pengakuan pendapatan mengacu pada waktu saat transaksi dicatat dalam pembukuan, pendapatan tersebut sudah direalisasi atau dapat direalisasi.¹⁰ Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru terdapat di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, surplus non operasional, dan pendapatan luar biasa. Sedangkan laporan realisasi anggaran diklasifikasikan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengakuan pendapatan oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru di akui pada saat terbitnya surat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pengakuan pendapatan itu kan mba ada di Laporan Operasional dan laporan Realisasi Anggaran kan ya Kalau untuk laporan operasional itu bagian-bagian nya ada terdiri dari PAD atau pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah kalau realisasi anggaran itu perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada tahun anggaran itu terdiri dari PAD.”¹¹

Adapun Klasifikasi pendapatan yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 4.4 tentang anggaran dan realisasi pendapatan dan tabel 4.5 tentang rincian pendapatan laporan operasional berikut.

¹⁰ James D.Stice, Earl K.Stice, dan K.Fred Skousen, *Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 493

¹¹ Ankharudin, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019.

Tabel 4.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016 dan 2015

No	Uraian	Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017	%	Realisasi TA 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.336.766.666,00	2.470.203.975,00	184,79	3.693.355.525,00
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
TOTAL		1.336.766.666,00	2.470.203.975,00	184,79	3.693.355.525,00

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tahun 2019

Tabel 4.5 Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	2.910.396.732,26	2.823.772.200,00	3,07
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	11.839.530.766,00	40.749.500,00	28.954,42
4	Surplus Non Operasional – LO	-	-	-
5	Pendapatan Luar Biasa – LO	-	-	-
TOTAL		14.749.927.498,26	2.864.521.700,00	414,92

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tahun 2019

d. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban dan belanja Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru terdapat di Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dalam Laporan Operasional, beban diklasifikasikan menjadi beban operasi dan beban transfer. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menjadi belanja operasi,

belanja modal dan belanja tidak terduga. “Belanja dan beban Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru merupakan segala transaksi yang dilakukan oleh bendahara yang diakui setiap kali terjadi pengeluaran yang kemudian kita laporkan pada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap bulan.”¹² Adapun Klasifikasi beban dan belanja yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 4.6 tentang beban dan tabel 4.7 tentang anggaran dan realisasi belanja berikut.

Tabel 4.6 Beban-LO

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Operasi	9.720.905.226,36	7.299.054.699,36	2.421.850.527,00	33,18
2	Beban Transfer	-	-	-	-
3	Defisit Non Operasional-LO	-	14.154.450,80	14.154.450,80	100,00
TOTAL		9.720.905.226,36	7.313.209.150,16	2.407.696.076,20	32,92

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tahun 2019

Tabel 4.7 Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2017 dan 2016

No	Uraian	Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017	%	Realisasi TA 2015
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	7.843.590.114,00	7.215.780.728,00	92,00	6.897.456.515,00
2	Belanja Modal	1.961.284.099,00	1.775.279.000,00	90,52	2.001.109.000,00
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
TOTAL		9.804.874.213,00	8.991.059.728,00	91,70	8.898.565.515,00

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tahun 2019

¹²Ankharudin, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019.

2) Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.¹³ Pengukuran terdiri dari pengukuran aset dan pengukuran kewajiban yang terdiri sebagai berikut.

a. Pengukuran Aset

Pengukuran aset lancar pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dinilai sebesar nilai nominal apabila kas dan piutang, investasi dinilai sebesar biaya perolehan, dan dinilai secara wajar apabila hibah/donasi. Sedangkan untuk aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan.

“Untuk aset lancar itu mba diukur seperti yang tercantum pada PP 71 yakni sebesar nilai nominal yang tertera kan sedangkan untuk aset tetap nya dicatat sebesar biaya perolehan saat hak milik aset tersebut sudah diterima dan menjadi aset Disdag”¹⁴

¹³ Lihat PP No. 71 Tahun 2010, paragraf 98 , hlm.38

¹⁴ Ankarudin, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019

b. Pengukuran Kewajiban

Pengukuran kewajiban yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru adalah kewajiban jangka pendek yang disajikan di dalam Neraca.¹⁵ Kewajiban jangka pendek tersebut diakui pada saat kewajiban itu timbul. “*Untuk pengukuran kewajiban dicatat sebesar kewajiban yang diterima setara nilai nominal*”¹⁶

3) Penyajian

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan.¹⁷

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.¹⁸

¹⁵ Lihat tabel 4.3 hlm.42

¹⁶ Ankhurudin, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019.

¹⁷ Lihat PP N o. 71 Tahun 2010, paragraf 14, hlm.48

¹⁸ Lihat PP No. 71 Tahun 2010, paragraf 45, hlm.53

Dalam Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Neraca disajikan sesuai dengan klasifikasi berdasarkan kriteria jenis akun standar seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.

“Neraca Dinas Perdagangan kota Banjarbaru menyajikan informasi terkait aset lancar, kas dan setara kas, piutang dan persediaan. Aset tetap yang dimiliki berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.”¹⁹

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.²⁰ Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; cakupan entitas pelaporan; periode yang dicakup; mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan.²¹ Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan seperti yang dijelaskan oleh kepala sub bagian keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Bapak Ankharudin dan Ibu Diah kasubag UMPEG. *“Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru semua nya juga telah berpedoman pada PP No 71 tahun 2010 itu yang menggambarkan anggaran*

¹⁹ Ankharudin, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019.

²⁰ Lihat PP No. 71 Tahun 2010, paragraf 8, hlm.78

²¹ Lihat PP No. 71 Tahun 2010, paragraf 9, hlm.78

dengan realisasinya selama satu periode pelaporan terdiri dari pendapatan, belanja dan SILPA.”²²

c. Laporan Operasional

Penyajian Laporan Operasional yang dibuat Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menyajikan informasi terkait pendapatan LO dan beban LO seperti yang dijelaskan oleh kepala sub bagian keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Bapak A’an dan Ibu Diah kasubag UMPEG “ *Penyajian LO dalam Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menggambarkan jumlah pendapatan operasional dan beban operasional, semua telah mengacu tentang pada PP No 71 itu tadi. (kepala sub bagian keuangan Disdag kota Banjarbaru Bapak A’an dan Ibu Diah kasubag UMPEG, 31 Januari 2019)*”. Adapun penyajian Laporan Operasional yang dimiliki dapat dilihat pada dokumen laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.²³

d. Laporan Arus Kas

Penyajian Laporan Arus Kas (LAK) tidak dibuat oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru seperti yang dijelaskan oleh kepala sub bagian keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Bapak A’an dan Ibu Diah kasubag UMPEG.

“ Kami tidak membuat Penyajian LAK dalam Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru karena hal tersebut hanya untuk fungsi perbendaharaan umum ”²⁴

²² Diah Ekawati Suprihatin, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019.

²³ Lihat pada tabel 4.5 dan 4.6 hlm.44-45.

²⁴ *Ibid.*,

Laporan Arus Kas hanya dihasilkan oleh entitas yang menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dalam hal ini Bendahara Umum Negara disingkat BUN di Dit Pb (Direktorat Perbendaharaan) sehingga tidak akan ditemui akun Kas Umum Negara (KUN) di level K/L (kementerian negara/lembaga), akun KUN hanya ditemui pada akuntansi di level BUN.

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang dibuat Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menyajikan informasi terkait ekuitas awal, surplus defesit LO dan koreksi ekuitas yang menambah/mengurangi ekuitas seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Bapak A'an dan Ibu Diah kasubag UMPEG berikut.

“Penyajian LPE dalam Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menggambarkan tentang ekuitas awal, surplus defesit LO dan koreksi ekuitas yang menambah/mengurangi semua telah sesuai dengan PP No 71 itu tadi.

Adapun penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 4.8 tentang Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 4.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	2017
Ekuitas Awal	48.329.634.433,23
Surplus Defisit LO	5.029.022.271,90
Koreksi Ekuitas (-)	(997.758.980,03)
Koreksi Ekuitas (+)	10.285.879,50
Jumlah	52.371.183.604,60

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tahun 2019

f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan Lain-lain; Saldo Anggaran Lebih Akhir.²⁵ Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) tidak dibuat oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru seperti yang dijelaskan oleh kepala sub bagian keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru "*Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tidak membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih.*"²⁶

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.²⁷

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru

²⁵ PP No 71 tahun 2010 paragraf 41, hlm.52

²⁶ Diah Ekawati Suprihatin, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019.

²⁷ PP No 71 tahun 2010 paragraf 83, hlm.35

mencakup informasi tentang penjelasan akun/pos-pos dalam setiap laporan yang Dinas Perdagangan buat “CaLK Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru itu merupakan rincian pos-pos dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan”²⁸

b. Data tentang Akuntansi berdasarkan PSAK No.45

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan digunakan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Dalam laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru tidak memasukkan laporan posisi keuangan dalam penyajiannya namun klasifikasi seperti aktiva dan kewajiban dimuat didalam neraca yang memuat aset lancar,aset tetap dan kewajiban.

2) Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.²⁹ Untuk laporan aktivitas memuat informasi tentang perubahan jumlah ekuitas selama satu periode itu tercermin di laporan perubahan saldo.

²⁸ Diah Ekawati Suprihatin, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019.

²⁹ Lihat PSAK No. 45, paragraf 20 , hlm 12.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas sendiri tidak dibuat oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru seperti yang telah dijelaskan pada saat penulis melakukan wawancara dengan narasumber sebelumnya. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan itu bersumber dari pendapatan yang disajikan di dalam laporan operasional dinas perdagangan.

2. Alasan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Menerapkan PP N0.71 tahun 2010 dan PSAK No.45

Menurut Kepala Sub Bagian Keuangan (kasubag keuangan) bapak Ankharudin saat penulis melakukan wawancara, Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru memiliki beberapa landasan hukum dalam penyusunan laporan keuangannya dan salah satunya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 sudah mengamanatkan secara jelas bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, karena itu sejak tahun 2016 Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru telah menerapkan PP No.71 walaupun masih banyak hal-hal yang membutuhkan penyempurnaan.

Saat saya melakukan wawancara dengan kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru ternyata mereka tidak menggunakan standar PSAK No 45 karena beberapa alasan yaitu, peraturan tersebut merupakan peraturan yang diperuntukkan untuk entitas nirlaba yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan sosial sedangkan dinas perdagangan kota Banjarbaru tidak memiliki pertanggungjawaban sosial seperti yayasan atau lembaga sosial lainnya dan tidak terdapatnya di dalam regulasi dinas perdagangan kota Banjarbaru mengharuskan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No 45.

B. Analisis Data

Setelah melihat laporan keuangan pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru maka penulis dapat menganalisis kesesuaiannya dengan PP No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan PSAK No 45 tentang organisasi nirlaba, adapun pembahasannya sebagai berikut.

1. Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru

a. Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Menurut PP No.71 tahun 2010

1) Pengakuan

Ketentuan syariah terkait pengakuan dapat kita lihat pada firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang dengan suatu utang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah menuliskannya di antara kamu seorang penulis dengan benar”³⁰

Ayat ini menunjukkan konsep identifikasi dalam proses akuntansi dimana identifikasi adalah proses awal akuntansi, yaitu mengidentifikasi suatu transaksi masuk kategori aset, kewajiban, beban, dan pendapatan.

- a. Pengakuan aset, terkait dengan aset Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru memperolehnya dari sumber pajak, retribusi dan setoran-setoran lain yang diakui pada saat uang diterima masuk ke rekening dan manfaat ekonominya selama periode berjalan. Hal ini telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.³¹ Dan aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya atau kekuasaannya berpindah. Dan aset tidak di akui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Tabel aset dapat dilihat pada halaman 40 tabel 4.1 tentang aset lancar dan tabel 4.2 tentang aset tetap pada halaman 41.

³⁰ Yusuf Burhanudin, *Al-Qur'an Cordoba The Biggest*, cet.1. (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2014),.hlm. 93

³¹ PP No 71 Tahun 2010 paragraf 90. Hlm. 37

- b. Pengakuan kewajiban, terkait dengan kewajiban Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru terdiri dari pendapatan diterima dimuka, utang beban dan kewajiban untuk dikonsolidasikan dan di akui pada saat kewajiban timbul. Hal ini sejalan dengan pernyataan di dalam PP No 71 Tahun 2010 yaitu Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.³² Tabel klasifikasi kewajiban dapat dilihat pada halaman 42 tabel 4.3 tentang kewajiban jangka pendek.
- c. Pengakuan pendapatan, dinas perdagangan kota Banjarbaru mengakui pendapatan pada saat kas diterima di rekening kas terdapat di dalam laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Pengakuan pendapatan dinas perdagangan telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 yang menyatakan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.³³ Tabel klasifikasi pendapatan dapat dilihat pada halaman 44 tabel 4.4 tentang anggaran dan realisasi pendapatan dan tabel 4.5 tentang rincian pendapatan laporan operasional masih pada halaman yang sama.

³² PP No. 71 Tahun 2010, paragraf 90, hlm.37

³³ PP No. 71 Tahun 2010, paragraf 95, hlm.37

d. Pengakuan beban dan belanja, dalam hal ini dinas perdagangan kota Banjarbaru mengakui beban dan belanja pada saat terjadi pengeluaran yang meliputi pengeluaran dari beban operasi dan beban transfer. Menurut PP No 71 Tahun 2010 beban dan belanja di akui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.³⁴ Tabel klasifikasi beban dan belanja dapat dilihat pada halaman 45 tabel 4.6 tentang beban dan tabel 4.6 tentang anggaran dan realisasi belanja pada halaman 46 .

2) Pengukuran

Ketentuan syariah terkait pengukuran dapat kita lihat pada firman Allah SWT surah Asy-Syu'araa ayat 181-184 sebagai berikut:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu merusakkan kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.” (QS.Asy-Syu'araa: 181-184)³⁵

a. Pengukuran aset, terdapat dua macam jenis aset di dinas perdagangan kota Banjarbaru yaitu aset lancar dan aset tetap.³⁶ Aset lancar di nilai sebesar nilai nominal apabila kas dan piutang, investasi dinilai sebesar biaya perolehan, dan dinilai secara wajar apabila hibah/donasi. Sedangkan aset tetap

³⁴ PP No. 71 Tahun 2010, paragraf 96, hlm.37

³⁵ Kementrian Agama RI, *Al -Kamal Al-Qur'an Tajwid Warna Tranliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu 2016). Hlm.374

³⁶ Lihat tabel 4.1 dan 4.2 hlm.40

dinilai sebesar biaya perolehan. Pernyataan tersebut sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yaitu pengukuran aset adalah sebagai berikut: kas dicatat sebesar nilai nominal, investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, piutang dicatat sebesar nilai nominal, persediaan dicatat sebesar: biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.³⁷ Berdasarkan pernyataan di atas Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dalam melakukan klasifikasi pengukuran sudah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 dengan mengukur aset tetap sesuai nilai nominal dan mengukur aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan.

- b. Pengukuran kewajiban, untuk pengukuran kewajiban Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dicatat sebesar kewajiban yang diterima setara nilai nominal.³⁸ Menurut PP No 71 tahun 2010 Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank

³⁷ Lihat PP No. 71 Tahun 2010, paragraf 69, hlm.56

³⁸ Lihat Tabel 4.3 hlm.42

sentral pada tanggal neraca.³⁹ Berdasarkan pernyataan di atas pengukuran kewajiban yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 dimana kewajiban tersebut telah diukur sebesar nilai nominal.

3) Penyajian

Dinas perdagangan kota banjarbaru meyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sedangkan menurut PP No 71 Tahun 2010 Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- a. Neraca, Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menyajikan informasi terkait aset lancar, kas dan setara kas, piutang dan persediaan. Aset tetap berupa tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan. Menurut PP No.71 tahun 2010 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu dan setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca dinas perdagangan kota Banjarbaru juga membagi kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca telah disajikan sesuai dengan klasifikasi berdasarkan kriteria jenis akun standar

³⁹ Lihat PP No. 71 Tahun 2010, paragraf 83, hlm.58

seperti pernyataan yang dijelaskan oleh kepala sub bagian keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Bapak Ankharudin dan Ibu Diah kasubag UMPEG saat peneliti melakukan wawancara. Dan Berdasarkan penyajian Neraca yang dibuat Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru maka dapat disimpulkan bahwa penyajiannya telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010. Dimana dalam neraca Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.⁴⁰

- b. Laporan Realisasi Anggaran, Penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan PP No 71 tahun 2010 menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru telah mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.⁴¹
- c. Laporan Operasional, Penyajian laporan operasional berdasarkan PP No 71 tahun 2010 menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan,

⁴⁰ Lihat Lampiran Neraca Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru

⁴¹ Lihat Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru

beban, pos-pos luar biasa, surplus/defesit. Penyajian Laporan Operasional yang dibuat Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menyajikan informasi terkait pendapatan LO dan beban LO yang telah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 lihat tabel 4.5 halaman 44 tentang rincian pendapatan LO dan tabel 4.6 halaman 46 tentang beban LO.⁴²

- d. Laporan Perubahan Ekuitas, Penyajian laporan perubahan ekuitas berdasarkan PP No 71 tahun 2010 menyajikan pos-pos ekuitas awal, Surplus/defesit LO, Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dan Ekuitas akhir. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang dibuat Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 karena menyajikan informasi terkait ekuitas awal, surplus defesit LO dan koreksi ekuitas yang menambah/mengurangi ekuitas lihat tabel 4.8 halaman 54.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dan Berdasarkan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan yang dibuat Dinas Perdagangan

⁴² Lihat Lampiran Keuangan Laporan Operasional Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru maka dapat disimpulkan bahwa penyajiannya telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 dimana dalam CaLK dinas perdagangan kota Banjarbaru menggambarkan rincian pos-pos dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas.

b. Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Menurut PSAK No.45

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menurut PSAK 45 menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih⁴³. Laporan posisi keuangan diklasifikasikan menjadi aktiva yang terdiri dari kas, setara kas, piutang, persediaan, sewa, investasi, serta aktiva tetap seperti tanah dan gedung. Sedangkan Dinas perdagangan kota Banjarbaru mengklasifikasikan kas, setara kas, investasi, piutang dsb pada aset lancar dan tanah, gedung, mesin di klasifikasikan pada aset tetap lihat halaman 41 tabel 4.2 perbedaan hanya terletak pada penyebutan sedangkan dalam pengklasifikasian sesuai dengan PSAK 45.

2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menurut PSAK 45 difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas diklasifikasikan menjadi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Dinas perdagangan kota Banjarbaru sendiri tidak membuat klasifikasi laporan aktivitas

⁴³ PP No.71 Tahun 2010 paragraf 10, hlm 10

seperti PSAK 45 namun pengklasifikasian seperti pendapatan dan beban di muat di laporan realisasi anggaran dan laporan operasional lihat tabel 4.4 tentang anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2016 dan 2015 halaman 44 dan tabel 4.7 tentang anggaran dan realisasi belanja tahun 2017 dan 2016 halaman 46.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menurut PSAK 45 menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode terdiri dari klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. Terkait penerimaan dan pengeluaran dinas perdagangan kota Banjarbaru tidak menerapkannya namun terkait penerimaan termuat di laporan realisasi anggaran antara anggaran (penerimaan baik dari pendapatan atau pembiayaan) dengan realisasi (pengeluaran seperti belanja operasi ataupun belanja modal).

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen mengenai penyajian laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru selanjutnya dibahas dan dianalisa secara mendalam dengan analisis deskriptif kemudian akan diberikan gambaran mengenai hasil penelitian tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun kriteria penilaian kesesuaian berdasarkan PP No.71 tahun 2010 dan PSAK No.45 yaitu:

- a. Sesuai, apabila seluruh perlakuan baik pengakuan, pengukuran, maupun penyajian sudah sesuai antara perlakuan akuntansi pemerintahan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dengan PP No.71 Tahun 2010 dan PSAK No.45 dengan rentang >66,6-100 %. dari 100%.

- b. Belum sesuai, apabila terdapat beberapa perlakuan baik pengakuan, pengukuran, maupun penyajian yang tidak sesuai antara perlakuan akuntansi pemerintahan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dengan PP No.71 Tahun 2010 dan PSAK No.45 dengan rentang >33,3-66,6% dari 100%
- c. Tidak sesuai, apabila seluruh perlakuan baik pengakuan, pengukuran, maupun penyajian tidak sesuai sama sekali antara perlakuan akuntansi pemerintahan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dengan PP No.71 Tahun 2010 dan PSAK No.45 dengan rentang 0 - < 33,3 % dari 100% .

Dilihat dari hasil wawancara yang terdapat di penyajian data, analisis laporan keuangan dinas perdagangan kota Banjarbaru penerapan laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan termasuk dalam kategori “a” yaitu sesuai karena telah meliputi pengakuan, pengukuran dan penyajian PP No.71 tahun 2010. Sedangkan untuk Penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No.45 dinas perdagangan kota Banjarbaru termasuk dalam kategori “b” yaitu belum sesuai karena laporan keuangan dinas perdagangan kota Banjarbaru belum menggunakan pembuatan laporan keuangan organisasi nirlaba karena beberapa alasan yang telah dipaparkan di penyajian data. Namun ada beberapa laporan yang tidak langsung sama seperti PSAK 45 seperti Laporan Posisi Keuangan di PSAK No.45 sama dengan Neraca pada PP No.71 tahun 2010 walaupun ada perbedaan dalam penyebutan pos-pos.

2. Alasan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Menerapkan PP No.71 Tahun 2010 dan PSAK No 45

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh presiden republik Indonesia Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatur secara khusus laporan keuangan di Instansi-instansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.⁴⁴. Menurut bendahara keuangan bapak anharudin saat penulis melakukan wawancara dinas perdagangan kota Banjarbaru memiliki beberapa landasan hukum dalam penyusunan laporan keuangannya dan salah satunya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu sejak tahun 2016 dinas perdagangan kota Banjarbaru telah menerapkan PP No.71 walaupun masih banyak hal-hal yang membutuhkan penyempurnaan. Laporan keuangan dinas perdagangan kota

⁴⁴ Dwi Martini, et al. eds. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Jakarta: Salemba, 2012), hlm. 18

Banjarbaru tahun anggaran 2017 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, operasional dan catatan atas laporan keuangan.⁴⁵

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 adalah sebuah aturan yang mengatur tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak mencari keuntungan. Dalam hal ini pemerintahan masuk di dalam kriteria tersebut karena organisasi yang *non profit oriented*. Saat saya melakukan wawancara dengan bendahara keuangan dan kasubag umpeg dinas perdagangan kota Banjarbaru ternyata mereka tidak menggunakan standar PSAK No 45, namun setelah saya lakukan penelitian secara tidak langsung sebenarnya disdag kota Banjarbaru sudah menerapkan PSAK No 45 walaupun ada beberapa perbedaan dalam pengklasifikasian pos-pos dan penyebutan nama laporan seperti neraca pada PP No 71 dan laporan posisi keuangan pada PSAK 45 namun Neraca (*balance sheet*) berisi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik entitas per tanggal tertentu juga disebut dengan Laporan posisi keuangan.⁴⁶

⁴⁵ Ankharudin, Bendahara Keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 31 Januari 2019.

⁴⁶ Charles T.Horngren dan Walter T.Harrison Jr., *Akuntansi Jilid 1* (Jakarta: Erlangga,2007), hlm.25